Jurnal Historical Cenderawasih
Jurnal Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan
Laman :
ISSN 3063-4377(Online)
Submitted: 20 Maret 2025
Accepted: 12 Mei 2025

Ketatanegaraan Pada Masa Pendudukan Jepang

Oryana Rumbewas
Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

*Email: oryanarumbewas500@gmail.com

ABSTRACT

The Japanese occupation of Indonesia lasted for approximately three and a half years, from 1942 to 1945. This period is referred to as the occupation period because, during Japan's control over Indonesia, the country was still engaged in warfare against the Allied forces in World War II. Thus, although Japan had de facto authority over the Dutch East Indies, de jure, Indonesia remained a colonial territory under the sovereignty of the Kingdom of the Netherlands. The ongoing state of war is one of the defining characteristics of the Japanese administration in Indonesia. Therefore, the term occupation is used to emphasize that Japan's control was temporary and rooted in a military context. The Japanese government in Indonesia was controlled by military authorities, including both the Imperial Army (Rikugun) and Navy (Kaigun). Nevertheless, for the sake of administrative efficiency and political stability, Japan retained several elements of the previous colonial administration, especially in terms of territorial and bureaucratic divisions.

Keywords: *Constitutional System, Japanese Occupation, Military Government, Colonial Administration, World War II*

PENDAHULUAN

Kebangkitan paham imperialisme merupakan faktor utama yang mendorong Jepang untuk menguasai Indonesia dan wilayah-wilayah lain di Asia Pasifik. Imperialisme ini sendiri didukung oleh doktrin *Hakko Ichiu* yang dikemukakan oleh PM Jepang pada saat itu, Jenderal Hideki Tojo. Intisari dari doktrin ini adalah pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar di dunia. Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang meliputi kawasan Asia Tenggara dengan Jepang, Cina, dan Manchukuo (Manchuria) sebagai tulang punggungnya.

Kebangkitan imperialisme Jepang sendiri berkaitan erat dengan Revolusi Meiji yang membuat Jepang setara dari segi industri dan militer dengan kekuatan-kekuatan Eropa. Jepang berhasil mengalahkan Rusia pada perang tahun 1904-05. Jepang juga tampil sebagai pihak pemenang di PD I dan berhasil merampas koloni Jerman di Pasifik. Rasa percaya diri

dan nasionalisme bangsa Jepang menguat. Jepang mulai merasa sebagai negara adidaya di Asia dan sudah seharusnya Asia berada di bawah 'naungan' Jepang. Inilah yang mendasari lahirnya doktrin *Hakko Ichiu* tadi. Sekarang Jepang mulai mengalihkan perhatiannya ke arah jajahan bangsa barat di Asia Pasifik. Mereka berusaha menumbangkan kekuasaan bangsa barat, pecahlah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya (1941-45).

Jepang mengobarkan perang pasifik dengan melakukan penyerangan mendadak terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai pada 7 Desember 1941. Setelah serangan ke Pearl Harbour, gerakan invasi Jepang merembet ke Asia Tenggara. Dengan cepat Jepang mampu menguasai Filipina pada bulan Januari 1942. Singapura bulan Februari 1942. Pada 10 januari 1942, Tarakan yang merupakan wilayah Hindia-Belanda yang merupakan tambang minyak terbesar berhasil kuasai oleh Jepang. Kemudian selanjutnya beberapa kota yang merupakan kota tambang minyak berhasil dikuasai oleh Jepang. Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati, secara resmi Pemerintah Hindia-Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia-Belanda kepada Jepang tanpa syarat.

METODE :

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai teknik yang relevan. Menurut Sugiyono (2019:18), analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada pendekatan induktif. Hasil penelitian kualitatif cenderung menitikberatkan pada proses penafsiran data dan mempertimbangkan aspek generalisasi secara kontekstual. Data penelitian ini adalah berbagai teks sejarah yang memuat informasi tentang masa pendudukan jepang di Indonesia. Data dan informasi yang terkumpul di analisis dan sintesis hingga menjadi tulisan sejarah tentang Ketatanegaraan Jepang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapitulasi Kalijati menjadi akhir kekuasaan Hindia Belanda sekaligus menjadi awal dari kekuasaan Jepang di Indonesia. Asas-asas pemerintahan Jepang di Indonesia sendiri diatur dalam "Asas-Asas Mengenai Pemerintahan di Wilayah-Wilayah Selatan yang Diduduki" (*Nampo Senryochi Gyosei Jisshi Yoryo*) yang disahkan dalam Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan dan Kantor Kabinet pada tanggal 20 November 1941. Dokumen tersebut memuat empat rencana pokok pemerintahan pasca penguasaan daerah Selatan oleh militer Jepang.

- *Pertama,* sasaran pemerintah militer adalah (a) memulihkan ketertiban umum; (b) mempercepat penguasaan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan nasional; dan

(c) menjamin berdikari di bidang ekonomi bagi personel militer.

- *Kedua*, status terakhir wilayah-wilayah yang diduduki dan pengaturannya pada masa depan akan ditentukan terpisah.
- *Ketiga*, dalam pelaksanaan pemerintahan militer, organisasi-organisasi pemerintahan yang ada akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menghormati struktur organisasi tradisional dan kebiasaan-kebiasaan penduduk setempat.
- *Keempat*, penduduk setempat akan dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kepercayaan kepada pasukan pasukan Jepang dan penggairahan secara prematur dari gerakangerakan kemerdekaan penduduk setempat harus dihindarkan

Teknis pelaksanaannya sendiri diatur dalam "Persetujuan Pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah-Wilayah yang Diduduki" (*Nampo Senryochi Gyosei Jisshi ni Kansuru riku-kaigun Chuo Kyotei*). Dokumen ini menjadi dasar dari pembagian wewenang militer di Indonesia.

Pertama, Pulau Sumatra diperintah oleh Tentara Ke-25 Angkatan Darat Jepang dengan Bukittinggi sebagai markas besarnya.

Kedua, di Pulau Jawa-Bali lahirlah pemerintahan militer yang dijalankan oleh Tentara Ke-16 Angkatan Darat Jepang dengan Batavia (kemudian diubah namanya menjadi Jakarta) sebagai markas besarnya.

Ketiga, Angkatan Laut Jepang membentuk pemerintah militer atas Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pelaksana dari pemerintahan militer ini adalah Armada Ke-3 Angkatan Laut Jepang (kemudian berubah menjadi Armada Wilayah Barat Daya) dengan Makasar sebagai markas besarnya.

Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri atas: Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut *Saikõ Shikikan* (panglima tertinggi) merupakan Pimpinannya, di bawah *Saikõ Shikikan* terdapat *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf Tentara. *Gunshireikan* menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan*, namanya *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam Kan Põ (berita pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu*. Panglima Tentara Keenambelas di pulau Jawa yang pertama, ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan kepala stafnya adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Dia diberi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat menjadi *Gunseikan*.

Staf pemerintahan militer pusat dinamakan *Gunseikanbu,* yang terdiri dan 4 macam bu (semacam departemen) yaitu *Sõmubu* (Departemen Urusan Umum), Zaimubu (Departemen Keuangan), *Sangyobu* (Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan)

dan *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), yang kemudian ditambah dengan bu yang kelima, yaitu Shihõbu (Departemen Kehakiman). Selanjutnya, koordinator pemerintahan militer setempat disebut *Gunseibu*, yang dibentuk di Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, di Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang, dan di Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Di samping itu dibentuk dua daerah istimewa (*kõci*) Surakarta dan Yogyakarta.

Pembagian administrasi pada masa pendudukan Jepang bisa dibilang hampir sama dengan pada masa Hindia Belanda. Wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Darat dibagi ke dalam *Syu* (Karesidenan). Wilayah Sumatera terbagi ke dalam 10 *Syu* yaitu Aceh, Sumatra Timur, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung. Sementara itu, Jawa dibagi ke dalam 16 Syu yang terdiri dari Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. *Syu* ini dibagi lagi ke dalam unit administrasi yang lebih kecil. Tingkatan administrasi di bawah *Syu* adalah *Syi* (kota praja) atau *Ken* (kabupaten), *Gun* (kawedanan/distrik), *Son* (kecamatan), dan *Ku* (desa) yang masing-masing dipimpin oleh *syico, kenco, gunco, sonco*, dan *kunco*.

Pembagian administrasi di Indonesia Timur yang berada di bawah wewenang Angkatan Laut sedikit berbeda. Pemerintahan militer yang dijalankan oleh Angkatan Laut ini, kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Minseifu* (pemerintahan sipil) yang membawahkan tiga buah *Minseibu*, yaitu: wilayah Kalimantan dengan Balikpapan sebagai markas besarnya; Sulawesi dengan markas besarnya di Makassar; dan Maluku-Nusa Tenggara dengan markas besarnya di Ambon. Sementara, Irian Barat (berubah nama menjadi Irian Jaya kemudian Papua) ditempatkan dalam satu pemerintahan dengan Papua Nugini. Penggabungan ini semata-mata dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang karena pertimbangan strategi mereka dalam menghadapi Perang Pasifik. Masing-masing *Minseibu* membawahkan *Syu*, *Ken, Bunken* (sub kabupaten), *Gun*, dan *Son.*

KESIMPULAN DAN SARAN:

Jepang membagi Indonesia ke dalam tiga wilayah yang masing-masing dikuasai oleh militer. Wilayah Jawa dan Sumatra dikuasai oleh angkatan darat sedangkan wilayah timur yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua berada di bawah kekuasaan angkatan laut. Sistem ketatanegaraan yang diterapkan oleh militer Jepang ini hampir sama meskipun ada sedikit perbedaan antara angkatan darat dan angkatan laut. Pemerintah jepang tetap mempertahankan pembagian administrasi peninggalan era sebelumnya, yang diganti biasanya hanya namanya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurliana, Nana. 1994. Wanita Indonesia di Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). Depok : (Laporan Penelitian) Universitas Indonesia.

Notosusanto, Nugroho, 1979. Tentara Peta : Pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1990. Sejarah Nasional Indonesia VI : Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka.

Ricklefs, M C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Ab. Drs. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Zulkarnain. 2012. Jalan Meneguhkan Negara, Sejarah Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Pujangga Press.

Surwarno, P.J. 2003. Tatanegara Indonesia : dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern.Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan kebangsaan Indonesia : dari kebangkiatan hingga kemerdekaan. Semarang : IKIP Press.